



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan Medical Check Up perlu dirubah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.**

f.

Pasal 1

Mengubah pasal 3 ayat 5 bagian lampiran pada lajur ke 4 sebagai berikut:

- Nomor urut 1 Medical Check Up:
Ketua Rp. 3.500.000 menjadi Rp. 7.500.000
Wakil ketua Rp. 3.500.000 menjadi Rp. 6.500.000
Anggota dari Rp. 3.500.000 menjadi Rp. 5.000.000
- Nomor urut 4 Tunjangan Transportasi Anggota :
Rp. 11.500.000 menjadi Rp. 14.500.000
- Nomor urut 5 Tunjangan Perumahan :
Wakil Ketua Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 23.000.000
Anggota Rp. 17.500.000 menjadi Rp. 19.500.000

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 30 Desember 2021

WALIKOTA AMBON, *h*

f. RICHARD LOUHENAPESSE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR

f.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON

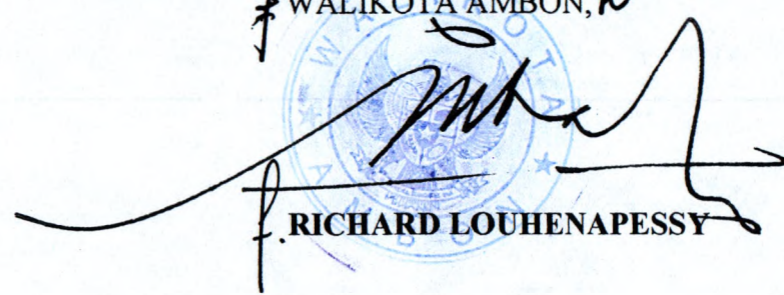
NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

No	URAIAN	JABATAN	JUMLAH		KET
1	2	3	4		5
1.	Jaminan Kesehatan				
	Check Up	Ketua	Rp. 7.500.000	Per tahun	1 Kali Check Up Dalam 1 Tahun
		Wakil ketua	Rp. 6.500.000	Per tahun	1 Kali Check Up Dalam 1 Tahun
		Anggota	Rp. 5.000.000	Per tahun	1 Kali Check Up Dalam 1 Tahun
	BPJS	Ketua	Rp. 84.000		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
		Wakil Ketua	Rp. 67.200		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
		Anggota	Rp. 63.000		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
2.	Tunjangan Kecelakaan	Ketua	Rp. 2.100.000	0,24%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil Ketua	Rp. 1.680.000	0,24%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
		Anggota	Rp. 1.575.000	0,24%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD
3.	Tunjangan Kematian	Ketua	Rp. 2.100.000	0,3%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil Ketua	Rp. 1.680.000	0,3%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
		Anggota	Rp. 1.575.000	0,3%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD

4.	Tunjangan Transportasi	Ketua			Mobil Jabatan
		Wakil Ketua			Mobil Jabatan
		Anggota	Rp. 14.500.000	Per Bulan	
5.	Tunjangan Perumahan	Ketua			Rumah Dinas
		Wakil Ketua	Rp. 23.000.000		Tidak Melebihi Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi
		Anggota	Rp. 19.500.000	Per Bulan	
6.	Tunjangan Belanja Rumah Tangga	Ketua	Rp. 15.500.000		
		Wakil Ketua	Rp. 12.500.000		

f. WALIKOTA AMBON, R

 f. RICHARD LOUHENAPESSY

f.